BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
KONTEN, TEORI KONSPIRASI, DAN COVID-19**

A. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologis, tindak pidana berasal dari kalimat yang berasal dari bahasa Belanda yang disebut sebagai *strafbaarfeit* karena dasar pijakan hukum pidana Indonesia tidak bisa lepas dari esensi doktrin hukum pidana Belanda, sebagai *causal effect* bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh otoritas Belanda selama kurang lebih 350 Tahun.

Istilah *Strafbaarfeit* ini dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namun menggunakan istilah yang berbeda dan pengertiannya juga terdapat perbedaan. Disamping menterjemahkannya dengan istilah tindak pidana, juga menterjemahkan dengan perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁸

Pada hakikatnya, *Strafbaarfeit* tidak sama dengan perbuatan pidana. *Feit* hanya dapat diartikan sebagai kelakuan semata sedangkan perbuatan diartikan sebagai kelakuan dan akibat. *Strafbaarfeit* memadukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbuatan pidana tidak mengandung pertanggungjawaban

⁵⁸ Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana : Edisi Revisi Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018, hlm. 43.

pidana.⁵⁹

Sudarto menyatakan bahwa terjemahan *strafbaarfeit* tidak merupakan menjadi masalah, yang terpenting adalah isi dari pengertian itu. Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana dalam esensi strafbaar feit dapat didefinisikan sebagai suatu pengertian yuridis.⁶⁰

Secara definitif dalam segi doktrin hukum dari Profesor Pompe, perkataan *strafbaarfeit* atau diartikan sebagai tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Kemudian, Simons merumuskan definisi tindak pidana yang lebih komprehensif dengan pijakan etimologis diksi "*strafbaarfeit*". dimana beliau kurang setuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Pompe, yakni sebagai berikut:⁶¹

"Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat tindak pidana".

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

⁶⁰ Tien S. Hulukati, *Op.Cit.*, hlm.48.

⁶¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 1

sebagai berikut:⁶²

- a. Harus ada perbuatan manusia sebagai subjek hukum;
- b. Perbuatan manusia sebagai subjek hukum tersebut betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan tersebut telah jelas dilarang oleh undang-undang dan aturan legalitas lainnya dan diancam dengan sanksi pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuat tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, unsur-unsur dalam esensi tindak pidana terdapat dua kategori, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku pembuat tindak pidana dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku yang harus dilakukan.⁶³

Adapun unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dari suatu

⁶² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

⁶³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 174-176.

tindak pidana yakni sebagai berikut:⁶⁴

1) Unsur-unsur subjektif:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau disebut sebagai *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatann-kejahatn perncurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau disebut sebagai *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur-unsur objektif

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelinkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya dalam kedinasan atau kejahatan jabatan yang tercantum menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yang memiliki makna bahwa adanya perbuatan pelaku tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu

⁶⁴ Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 3-5.

adalah sebuah kerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan bahwa adanya keharusan hubungan sebab-akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Adapun teori-teori mengenai kausalitas yakni sebagai berikut:

a) Teori *Conditio sine qua non* (teori syarat mutlak)

Teori ini berasal dari ahli hukum Von Buri yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.⁶⁵

b) Teori Generalisir atau Teori *Adequate Veroorzaking* (sebab yang bersifat dapat dikira-kirakan)

Teori ini dikemukakan oleh Von Bar yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.⁶⁶

c) Teori Individualisir

Teori ini dikemukakan oleh Traeger dan Karl Binding, yang mengajarkan bahwa sebab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif.

⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 142.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 142-143.

Sangatlah mungkin sebab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu kelakuan atau tindakan.⁶⁷

d) Teori Relevansi

Teori ini dikemukakan oleh Noyon, Langemeijer dan Mezger yang mengajarkan bahwa adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akiibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang.⁶⁸

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Menurut Professor Van Hamel, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Klasifikasi ini diciptakan karena adanya pengaruh dari pembagian dari tindak pidana yang disebut sebagai "*rechtsdelicten*" dan "*wetsdelicten*" jika dilihat dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁹

Kejahatan adalah *rechtsdelict*, memiliki arti bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu aturan dengan basis legalitas

⁶⁷ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit.*, hlm. 217.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 220.

⁶⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 210.

atau tidak, sehingga perbuatan tersebut telah nyata dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.⁷⁰

Pelanggaran atau yang disebut sebagai *wetsdelict*, memiliki arti bahwa perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁷¹

Adapun klasifikasi tindak pidana secara perspektif non-KUHP yakni dilihat dari cara perumusannya, yakni yang dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana materil (*materiil delicten*) dan tindak pidana formil (*formeel delicten*).

Tindak pidana materil atau dapat disebut sebagai delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana formil atau delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan telah dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁷²

B. Kajian Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara etimologis, pertanggungjawaban pidana berasal dari kalimat atau diksi yang merupakan suatu asas pidana yakni “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau disebut juga sebagai “*Keine Strafe Ohne Schuld*”, dan secara bahasa latin disebut sebagai “*Actus non facit*

⁷⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.86.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 86-87.

⁷² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.213.

reum nisi mens sit rea". Asas ini lahir dari Yurisprudensi *Hooge Raad* Kerajaan Negara Belanda (*Koninkrijk der Nederlande*) pada tanggal 14 Februari 1916.⁷³

Menurut Remmelink, asas ini memiliki fungsi hukum agar negara memiliki justifikasi teoritis untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri orang yang membuat tindak pidana tersebut harus memiliki kesalahan (*Schuld*).⁷⁴

Menurut Simons, bahwa dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (*Als grondslag voor de strafrechtelijke toerekening bestaat zij beoordeeling staande handeling en wel in dien zin, dat op grond van die gesteldheid aan de dader van zijn handelen een verwijt mag worden gemaakt*).⁷⁵

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu aspek atas diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana, dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat

⁷³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 155.

⁷⁴ Hanafi Rais & Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 142.

dipidana karena perbuatan pidana tersebut.⁷⁶

2. Hakikat dan Esensi Pertanggungjawaban Pidana

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa asas ini memiliki hakikat tujuan hukum dalam aspek perkembangan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban terhadap suatu pidana. Adapun hakikatnya yakni:⁷⁷

- 1) Asas ini mencerminkan aspek filosofi mengenai pikiran manusia (*the philosophy of human minds*) dan kejiwaan seorang manusia;
- 2) Asas ini merupakan wujud aplikasi dari teori klasik mengenai fungsi hukum pidana dalam masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antara tindak pidana (perbuatan yang dapat dihukum) dan pertanggungjawaban pidana;
- 3) Asas ini merupakan justifikasi penjatuhan hukuman;
- 4) Asas ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, namun yang terjadi adalah keadaan kepastian hukum dalam ketidakpastian hukum (*legal centrainty in a legal uncertainty*).

Secara historis, pada awal fase perkembangan hukum pidana Belanda pada abad ke-20, perspektif hukum pidana dalam esensi konsep pertanggungjawaban pidana hanya melihat pada perbuatan

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 75.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 142.

dan akibatnya saja (*Tatstrafrecht*).

Kemudian pada perkembangan berikutnya, hukum pidana mulai memiliki perspektif dan memperlihatkan pada pembuat tindak pidana yakni subjek hukum (*Taterstrafrecht*) tanpa meninggalkan *Tatstrafrecht*. Lalu pada perkembangan berikutnya yang sampai saat ini dipertahankan, hukum pidana sudah berorientasi pada perbuatan pidana beserta akibat dan pembuatnya (*Tat-Taterstrafrecht* atau *Daad-Daderstrafrecht*).⁷⁸

Secara historis dalam esensi pertanggungjawaban pidana, ketika hukum kolonial Belanda telah diresepsi kedalam hukum positif Indonesia, dalam aspek hukum pidana kolonial warisan pemerintah Hindia Belanda telah mewariskan karakter individualistis, yaitu hukum pidana hanya didasarkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*) dan pelaku individu (*daad-dader strafrecht*) serta tanggung jawab individu bukan bersifat kolektif.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu aspek atas diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana, dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan pidana tersebut.⁷⁹

Arti dari celaan objektif adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang

⁷⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 131.

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Loc. Cit.*

dilarang, dengan indikator bahwa perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang secara hukum. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh individu, namun jika individu tidak dapat dicela karena tidak terdapat suatu kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁸⁰

Mengenai celaan objektif dan celaan subjektif dalam konsep pertanggungjawaban pidana, Sudarto menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Sehingga meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi.⁸¹ Yang pada selanjutnya akan menghasilkan kondisi pelaku dengan istilah *a guilty*

⁸⁰ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 21.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 30.

mind, yakni bahwa seseorang dianggap bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang nyata-nyata salah.

Untuk aspek penidanaan, masih diperlukan adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yakni bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif) seseorang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸²

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara komprehensif, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat tindak pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:⁸³

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Pembuat yang membuat tindak pidana dapat dielaborasi dan dapat disebut sebagai perbuatan pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*strafbaar feit*". Menurut Simons, perbuatan pidana atau *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁸² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988, hlm. 85.

⁸³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77.

Kemudian, Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁴ Adapun elemen-elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
 - 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
 - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana;
 - 4) Unsur melawan hukum yang objektif, atau *objektif onrechtselement* adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik;
 - 5) Unsur melawan hukum yang subjektif, atau *subjektif onrechtselement* adalah niat atau sikap batin dari pelaku.
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan pembuat;

Menurut Mezger, kesalahan dapat diartikan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.⁸⁶ Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana

⁸⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hlm. 17.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 69.

⁸⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 134-135.

*adagium facinus quos inquinat aequat.*⁸⁷

Elemen-elemen kesalahan meliputi kemampuan bertanggungjawab, kemudian adanya hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, yang melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan, serta tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.⁸⁸

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut sejarahnya, teori kehendak atau *wilstheorie* adalah teori tertua yang dianut oleh von Hippel dari Gottingen, Jerman. Sedangkan untuk teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* diajarkan oleh Frank, Guru Besar Tubingen, Jerman sekitar tahun 1910.⁸⁹

Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti

⁸⁷ Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Laksbang Justisia, Surabaya, 2019, hlm. 181.

⁸⁸ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit.*, hlm.163.

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 185.

pengetahuan tersebut.⁹⁰

Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Dalam hal kehendak, teori kehendak memberikan penjelasan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan dalam hal mengetahui, teori pengetahuan memberikan penjelasan bahwa kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.⁹¹

Terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yakni sebagai berikut:⁹²

1) *Dolus Malus*

Dolus malus memiliki hakikat gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*), bahwa menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana apabila seseorang tersebut sudah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana, sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu

⁹⁰ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁹¹ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit.*, hlm.169.

⁹² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 294-301.

perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

2) *Dolus Eventualis*

Dolus eventualis memiliki arti kesengajaan yang bersifat kemungkinan. Bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang kealpaan (*culpa*). Pompe mengatakan, “*De schuld als zodanig wordt in de wet niet genoemd. Als de wetgever het word schuld gebruikt, verstaat hij er iets anders onder dan hier. In het Wetboek van Strafrecht betekent het : onachtzaamheid..*”⁹³ (Kealpaan sebagai demikian tidak disebut dalam undang-undang. Bila pembentuk undang-undang menggunakan istilah kealpaan, pengertiannya berbeda dengan apa yang disebut disini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti : ketidakhati-hatian).

Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya. Kealpaan adalah kesalahan,

⁹³ W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, W.E.J Tjeenk, Willink, Zwolle, 1959, hlm. 147-148.

sesuai dengan adagium hukum *imperitia culpae annumeratur*. Kemudian kealpaan sendiri merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana dengan mekanisme pidana terbaik, sesuai dengan adagium hukum *imperitia est maxima mechanicorum poena*, yang artinya kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik dalam hukuman, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya.⁹⁴

Adapun dua kategori kealpaan (*culpa*) yakni *culpa* subjektif dan *culpa* objektif. *Culpa* subjektif lebih menitikberatkan pada keadaan individu. Di sini adanya kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang ekstra cermat atau hati-hati.⁹⁵ Sedangkan *Culpa* objektif tidak berdasarkan seperti subjektif melainkan pada perbuatan lahir secara objektif.⁹⁶

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni:⁹⁷

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste culpa* atau *culpa lata*)

Pembuat tindak pidana telah dapat membayangkan

⁹⁴ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit.*, hlm.187.

⁹⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 182.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 183.

⁹⁷ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 217.

atau menduga bahwa akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha untuk mencegah akibat tersebut, ternyata akibat tersebut tetaplah timbul.

- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/onbewuste culpa*, atau *culpa levis*)

Pembuat tindak pidana tidak membayangkan ataupun menduga akan timbulnya suatu akibat yang telah dilarang atau di ancam hukuman oleh hukum positif sesuai dengan asas legalitas, sedangkan ia seharusnya dapat memperhitungkan timbulnya suatu akibat.

Sudarto menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk menentukan *culpa* pada diri seseorang, yakni sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Kealpaan orang tersebut haruslah ditentukan secara normatif, tidak secara fisik ataupun psikis. Haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi tertentu.
- 2) Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa, tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli, dan sebagainya.

⁹⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.128-129.

- 3) Untuk menentukan kekurangan penghati-hatian dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia “*ada kewajiban untuk berbuat lain*”.
 - 4) Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya.
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya;

Van Hamel memberikan deskripsi mengenai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana, yakni bahwa orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang mampu menginsyafi arti perbuatan pidananya (secara makna dan akibatnya), kemudian orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Kemudian, dalam hal ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana, *Memorie van Toeliching* (MvT) memberikan penjelasan bahwa tidak mampu bertanggungjawab adalah dalam hal orang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat

apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, serta dalam hal orang berada dalam keadaan tertentu yang membuat orang tersebut tidak dapat menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan kategori dan unsur terhadap orang pembuat tindak pidana yang tidak dapat bertanggungjawab secara hukum yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakitnya, tidak dipidana.

Adapun metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, yakni:

- 1) Metode biologis

Jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka ia tidak dapat dipidana.

- 2) Metode Psikologis

Metode ini akan menunjukkan mengenai hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatan pidananya. Metode ini mengedepankan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak mampu

bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.

3) Metode Biologis-Psikologis

Metode ini memiliki maksud bahwa di samping memperhatikan keadaan jiwanya, kemudian keadaan jiwa ini dinilai dengan korelasi perbuatannya untuk dinyatakan bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab.

4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) ialah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, berkaitan dengan culpabilitas atau kealpaan. Dalam *Common Law System*, alasan pemaaf memiliki korelasi dengan *mens rea* (niat pelaku).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, sehingga tetap dianggap sebagai perbuatan pidana, tetapi pelaku pembuat tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada suatu kesalahan (*schuld*).⁹⁹

4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Aspek hapusnya pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif melihat perspektif jiwa dari pembuat tindak pidana yang merupakan subjek hukum.

⁹⁹ Tien S. Hulukati, *Op.Cit.*, hlm. 118.

Aspek legalitas normatif mengenai alasan penghapus pidana telah termuat di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan penerapan pidana. Adapun selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :¹⁰⁰

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :¹⁰¹

- 1) Alasan penghapus pidana yang umum, yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.
- 2) Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya

¹⁰⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 28.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.29.

berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Dalam ketentuan ini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih memiliki hubungan darah).

Teori hukum pidana telah mengadakan perbedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :¹⁰²

- 1) Alasan pembenar, yakni yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak memiliki sifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.
- 2) Alasan pemaaf, yakni yang menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dalam konsep ini terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat,

¹⁰² M. Rifan F, dkk., *Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim*, Diponegoro Law Review Vol. 4 No.1, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm.5.

sehingga tidak dipidana.

C. Tinjauan Umum Konten Teori Konspirasi

1. Pengertian Konten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹⁰³ Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam (*handphone*).¹⁰⁴

Secara definitif, konten dapat diartikan sebagai suatu kabar atau informasi yang tersedia dan telah disebarakan melalui sarana media non-telematik maupun telematik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam telematik, salah satu sarana penyebaran konten yakni melalui internet.

Konten adalah kumpulan-kumpulan narasi bahasa yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Hal ini jelas karena bahasa adalah alat yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain (apakah itu berbentuk ide, informasi atau opini baik mengenai hal yang konkret maupun yang abstrak dan bukan hanya tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, melainkan pada waktu yang lalu dan yang akan datang).

¹⁰³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Loc. Cit.*

¹⁰⁴ Paulins, Nauris, Signe Balina, and Irina Arhipova. *Loc. Cit.*

Media massa memuat banyak konten dan dapat mengarahkan masyarakat membentuk opini akan suatu peristiwa yang selanjutnya akan terjadi. Pada dasarnya, media massa dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak serta media massa elektronik. Media komunikasi yang saat ini diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan beberapa konten yang diinginkan adalah media massa elektronik atau dikenal juga sebagai media massa *online* atau media digital, yang salah satu bentuk produknya adalah adalah sosial media.¹⁰⁵

Sosial media sebagai bagian dari media digital dalam aspek penyebaran konten membuat para pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses berbagai konten media apa saja. Maka dari itu konten yang tersedia di dalam sosial media disebut juga sebagai bagian dari rangkaian lahirnya *New Media*.¹⁰⁶

Media digital menjadi alternatif sumber konten bagi banyak pengguna Internet di Indonesia. Informasi tidak lagi menjadi monopoli milik media konvensional arus utama. Media digital membuka lebar keran konten yang dapat dikatakan tidak memiliki “filter” atau penyaring konten.¹⁰⁷

Secara epistemologis dalam perspektif ilmu komunikasi, suatu konten dapat mempengaruhi perspektif dari orang yang membaca isi

¹⁰⁵ M. Mandiberg, *The Social Media Reader*, NYU Press Organization, New York, 2012, hlm. 2.

¹⁰⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 16.

¹⁰⁷ Detta Rahmawan, dkk, *Pengembangan Konten Positif Sebagai Bagian Dari Gerakan Literasi Digital*, *Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran*, Volume 7 No. 1, 2019, hlm. 32.

konten. Perkembangan media dalam menyebarkan konten-konten dan informasi bisa memberikan efek bagi masyarakat. Donald F. Robert mengatakan bahwa efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media tersebut, karena fokusnya adalah pesan.¹⁰⁸

Pada akhirnya, suatu konten akan masuk ke dalam ruang komunikasi massa sebagai bagian dari kegiatan penyebaran konten, yang diprakarsai oleh komunikator. Ketika komunikator ingin menyampaikan ide atau gagasan kepada orang banyak mempunyai tempat tinggal berlainan pada saat yang sama, maka ia harus menggunakan media yang dapat menjangkau khalayak secara luas atau komunikasi massa. Seperti yang diungkapkan oleh Onong Uchjana Effendy dalam bukunya *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, “Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media”.¹⁰⁹

Konten yang dikategorikan sebagai konten yang sesuai dengan kaidah-kaidah konsep ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, konten haruslah sesuai dengan konsep *Content Analysis*. *Content Analysis* adalah konsep ilmu komunikasi yang mempelajari informasi secara sistemik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan konten yang diperlihatkan.

¹⁰⁸ Wilbur Schramm dan Donald F. Roberts, *The Process and Effects of Mass Communication*, University of Illinois Press, Illinois, 1990, hlm.28.

¹⁰⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.80 .

Dalam suatu konten harus tercantum nilai pesan yang objektif dari pembuat konten yang berobjektivitas. Konsep objektivitas pemberitaan memiliki dua dimensi, yakni *factuality* (dimensi kognitif atau disebut sebagai kualitas informasi pemberitaan), serta *impartiality* (dimensi evaluatif pemberitaan dihubungkan dengan sikap yang netral dari komunikator terhadap suatu objek pemberitaan, menyangkut kualitas dalam penanganan aspek penilaian, opini, interpretasi yang subjektif, dan sebagainya). Esensi *factuality* memiliki dua sub-dimensi, yakni *truth* dan *relevance*.¹¹⁰

Sub-dimensi *truth* dimaksudkan untuk tingkat kebenaran atau keterandalan (reliabilitas) fakta yang disajikan, yang ditentukan oleh *factualness* (pemisahan yang jelas antara fakta dan opini), *accuracy* (ketepatan suatu data yang diberitakan, seperti jumlah, tempat, waktu, nama dan sebagainya), serta *completeness* (dimaksudkan untuk menjawab suatu pertanyaan apakah semua fakta dan peristiwa telah di beritakan seluruhnya dengan memenuhi unsur 5W+1H).¹¹¹

Sub-dimensi *relevance* mensyaratkan perlunya suatu tindakan seleksi menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan khalayak pembaca atau masyarakat umum . Relevansi mencakup nilai berita seperti *proximity*, *timeliness*, *significance*, *prominence* dan *magnitude*.¹¹²

¹¹⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 244.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

2. Pengertian Teori Konspirasi

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan deskripsi bahwa kata konspirasi memiliki arti yakni suatu tindakan atau perbuatan dengan skema persekongkolan atau komplotan. Sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut dengan konspirator. Kemudian, suatu pendapat yang diiringi dengan kandungan esensi anasir-anasir konspirasi yang dibuat oleh konspirator disebut dengan teori konspirasi.

Menurut kamus dari Cambridge Dictionary, Teori konspirasi adalah : *“a belief that an event or situation is the result of a secret plan made by powerful people”*, atau sebuah sikap keyakinan bahwa dalam suatu peristiwa atau situasi merupakan rangkaian yang menciptakan hasil dari rencana rahasia yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa.¹¹³

Teori konspirasi dapat didefinisikan juga sebagai penjelasan yang ditawarkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana menyebut kelompok kecil tertentu sebagai aktor utama (*conspirators*) yang bergerak secara rahasia untuk keuntungan diri sendiri, dengan maksud jahat.¹¹⁴

Menurut Karl Popper, yang dimaksud dengan teori konspirasi adalah suatu kenyataan di mana penjelasan dari suatu fenomena

¹¹³ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conspiracy-theory>, (diakses pada tanggal 29 Februari 2021, Pukul 10:22 WIB).

¹¹⁴ Joseph E. Uscinski, *What Drives Conspiratorial Beliefs? The Role of Informational Cues and Predispositions*, Journal of Political Research Quarterly Vol. 69, No. 1, University of Miami, 2016, hlm. 2

sosial terdiri atas keberadaan fenomena itu sendiri (di mana terdapat kepentingan yang tersembunyi yang harus terungkap terlebih dahulu) dan orang yang merencanakan dan berkonspirasi tersebut untuk menciptakan fenomena tersebut.¹¹⁵

Secara perspektif ilmu komunikasi, teori konspirasi merupakan bentuk ekstrem dari informasi konten dengan kandungan bias konfirmasi. Bias konfirmasi (*Confirmation bias*) adalah sebuah sikap berpikir induksi, dimana seseorang atau individu cenderung untuk memperhatikan informasi yang mendukung hal-hal yang di percayai benar dan mengacuhkan ataupun meremehkan hal-hal yang menyanggah kepercayaan yang telah dipercayai.¹¹⁶

Ketika seseorang melakukan tindakan dan menerima kehendak bias konfirmasi, maka seseorang akan cenderung terus mencari informasi yang mengonfirmasi suatu keyakinan. Sementara di satu sisi, ia menutup mata akan adanya informasi lain.

Kemudian, adapun bias lain yang dilakukan oleh orang yang mempercayai teori konspirasi, yakni berupa bias proporsionalitas. Bias proporsionalitas adalah kecenderungan manusia untuk melakukan suatu asumsi bahwa sesuatu yang besar terjadi karena

¹¹⁵ Karl Popper, *The Open Society and Its Enemy : The High Tide of Prophecy Hegel and Marx*, Routledge, London, 1945, hlm.94 .

¹¹⁶ Jess Whittlestone, *The Importance of Making Assumptions: Why Confirmation is Not Necessarily a Bias*, Thesis from Jess Whittlestone that submitted in partial fulfillment for the degree of Doctor of Philosophy in the Behavioural Science Group Warwick Business School, Coventry, 2017, hlm. 186.

sesuatu yang besar juga, dan sesuatu yang kecil terjadi karena sesuatu yang kecil juga.

Stahl dan Van Prooijen menyatakan bahwa teori konspirasi merupakan kombinasi dari pemikiran analitik dan motivasi untuk menjadi rasional. Pemikiran analitik yang digunakan sebagai bukti pendukung berupa fakta yang terpelintir sesuai kepentingan penyebarannya. Tindakan manipulatif terhadap suatu fakta sebagai bukti pendukung tersebut dilakukan supaya teori bersifat rasional. Ketika bukti pendukung telah bersifat rasional, maka teori konspirasi yang disampaikan akan dapat diterima oleh para pembaca. Teori konspirasi yang unggul dalam kepopuleran berkat mudah dipahami kemudian bersaing menantang penelitian dan musyawarah pakar.¹¹⁷

Teori konspirasi membuat suatu informasi menjadi distortif, karena klaim-klaim yang dituangkan ke dalam suatu informasi atau konten mengesampingkan kebenaran data. Maka dari itu teori konspirasi pun menjadi bagian dari informasi era *post-truth*. Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* dan Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan terkait dengan post-truth yaitu *truthfulness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.¹¹⁸

¹¹⁷ Tomas Ståhl, *Epistemic Rationality: Skepticism Toward Unfounded Beliefs Requires Sufficient Cognitive Ability and Motivation To Be Rational*, Elsevier Journal Volume 122 No. 1, February 2018, hlm.156.

¹¹⁸ Ralph Keyes, *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*,

Era *post-truth* dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital dimana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, melainkan juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat.

Teori Konspirasi di era *post-truth* berkembang pesat karena adanya *citizen journalism* yang beriringan dengan eksistensi *wide-open media*.¹¹⁹ Pada era ini, semua pihak dapat berperan sebagai media dan dapat mengolah suatu informasi, sehingga prinsip etik jurnalisme seperti prinsip *check and recheck* terhadap suatu konten tidak diterapkan secara komprehensif bagi pembuat teori konspirasi.

Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber tunggal kebenaran harus menerima kenyataan akan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi. Fakta-fakta bersaing dengan *hoax* dan kebohongan untuk dipercaya publik.

Pembuat teori konspirasi memanipulasi semua bukti secara terukur, agar sesuai dengan penjelasan pembuat teori konspirasi

St. Martin's Press, London, 2004, hlm.15.

¹¹⁹ Stephanie Craft, *News Media Literacy and Conspiracy Theory Endorsement*, Communication and the Public Journal, Vol. 2, Issue 4, Zhejiang University, Hangzhou, 2017, hlm. 1.

tersebut. Tetapi yang lebih buruk adalah pembuat teori konspirasi akan menekankan ketiadaan bukti sebagai konfirmasi yang lebih meyakinkan. Teori konspirasi dapat menghasilkan kepanikan moral yang membuat orang-orang tidak bersalah terluka.¹²⁰

Dari tindakan manipulasi bukti tersebut, maka suatu informasi berbasis teori konspirasi menghasilkan muatan konten yang bersifat berita bohong (*hoax*) atau berupa disinformasi, dengan cara falsifikasi data tanpa melakukan konfirmasi data yang disajikan. Sehingga, informasi berbasis teori konspirasi mengandung hakikat konten yang sarat akan kesalahan, atau disebut juga dengan *misleading content*.

Informasi berupa teori konspirasi yang disebarkan secara umum dan masif akan berdampak kepada turunnya kepercayaan terhadap institusi-institusi dan pakar yang berkompeten sesuai bidangnya, serta enggan untuk mempelajari apapun yang kontra dengan informasi teori konspirasi yang telah dibaca dan dikonsumsi oleh seseorang, dengan basis validitas data yang minim dalam segi esensi informasinya.¹²¹

Teori konspirasi saat ini merupakan tantangan bagi masyarakat yang ada di dalam ruang *public sphere* atau disebut juga dengan ruang publik digital. Kehidupan yang lebih baik mana

¹²⁰ Tom Nichols, *Matinya Kepakaran: Perlawanan terhadap Pengetahuan yang Telah Mapan dan Mudaratnya*, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 67.

¹²¹ Joseph E. Uscinski, *The Study of Conspiracy Theories*, University of Miami, Miami, 2017, hlm.9.

antara nyata atau didunia maya. Kehidupan didunia nyata dirasa cukup sulit. Untuk memunculkan sebuah *public sphere*, ruang diskusi meski bertujuan dalam pembelajaran. Kenyataannya memiliki banyak intervensi baik dari hukum ataupun norma. Ketika sebuah *public sphere* menuntut kesamaan status dalam ruang demokrasi dalam zaman *cyber democracy*.¹²²

Cyber democracy sangat berkembang pesat karena eksistensi kebebasan pada abad-21 yang mendorong kebebasan berpendapat secara mutlak yang menjadi hak masing-masing personal, sehingga kadang kala manusia menyalahgunakan kebebasan tersebut diantaranya adalah pendapat yang dikemukakan melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma masyarakat lainnya.¹²³

Norma di kehidupan nyata selalu membatasi dengan masalah etika, usia, status sosial, tingkat pendidikan dan lain-lain. Berbagai norma akan mendatangkan intervensi dan ketidaksetaraan demokrasi dan tidak tercapainya tujuan dari *public sphere*. Masalah seperti kebebasan berpendapat, argumen, kritik, saran, opini dan sebagainya menjadi bebas ketika didalam dunia maya, sehingga konten yang tidak berdasarkan fakta konkrit seperti teori konspirasi dapat beredar secara masif. Identitas sosial bisa dibatasi dan sesama

¹²² Mark Poster, *Cyberdemocracy: Internet and The Public Sphere*, Routledge, London, 1995, hlm. 201.

¹²³ Noah D. Zatz, *Sidewalks in Cyberspace: Making Space for Public Forums in the Electronic Environment*, Harvard Journal of Law and Technology, Vol.2 No.1, 1998, hlm. 201.

kontak tak bisa saking mengenali, sehingga dapat terciptanya kondisi kondusif diskusi tanpa intervensi status sosial dan sebagainya.

Teori konspirasi akan berdampak pada solidaritas masyarakat terhadap institusi yang berperan dalam hal-hal penting menjadi menurun seperti institusi pemerintah, lembaga riset dan sebagainya, yang menyebabkan apatisme kemasyarakatan karena hal-hal atau aspek tertentu yang dilekatkan dengan teori konspirasi dianggap hanya sebagai karangan konspirasi saja. Hal ini tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga akan merugikan orang lain dan besar kemungkinan secara masyarakat menyeluruh menjadi korban.¹²⁴

Secara psikologis, konsumsi terhadap suatu teori konspirasi akan menyebabkan pembaca atau penikmat teori konspirasi menjadi enggan untuk menyalahkan diri sendiri, dan akan menyalahkan orang tau pihak-pihak lain secara acak. Hal ini merupakan salah satu daripada bentuk keyakinan irasional, karena penikmat teori konspirasi mengesampingkan data dan fakta, dan selalu mengedepankan subjektivitas dan sikap emosional.¹²⁵

¹²⁴ Lotte Pummerer, Robert Böhm, Lau Lilleholt, dkk, *Conspiracy Theories and Their Societal Effects During the COVID-19 Pandemic*, Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen, Germany, 2020, hlm. 2.

¹²⁵ Roland Imhoff, *Too Special to be Duped: Need For Uniqueness Motivates Conspiracy Beliefs*, *European Journal of Social Psychology* Volume 47, Issue 6, 2016, hlm. 1.

D. Pengertian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah suatu penyakit yang bersifat menular yang bermuara dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 adalah *coronavirus* dalam jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada tubuh manusia.¹²⁶

Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus invididu yang terjangkit pneumonia di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut di duga kuat berhubungan dengan Pasar Seafood yang terletak di Kota Wuhan.¹²⁷

Kemudian, pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah *Coronavirus* jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*).

Virus SARS-CoV-2 berasal dari famili (golongan) yang sama dengan virus yang menjadi penyebab SARS dan MERS, namun SARS-Cov-2 lebih mudah menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV.¹²⁸

Penyebab COVID-19 adalah virus yang masuk kepada golongan *family coronavirus* (famili virus corona). Coronavirus merupakan sebuah virus RNA dengan strain tunggal positif, memiliki bentuk

¹²⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm.19-20.

¹²⁷ Wang Zhou, *The Coronavirus Prevention Handbook : 101 Science-Based Tips That Could Save Your Life*, Skyhorse Publishing, New York, 2020, hlm.86.

¹²⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Op.Cit*, hlm. 20.

berkapsul, dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada *Coronavirus* yaitu protein N (nukleokapsid, glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (Spike), protein E (selubung).

Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yakni *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gammacoronavirus*, dan *deltacoronavirus*. Sebelum adanya COVID-19, ada enam jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*), HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*).

Dalam etiologinya, COVID-19 termasuk ke dalam genus *betacoronavirus*, yang memiliki bentuk bundar dengan beberapa pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Hasil analisis daripada filogenetik telah menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 masuk kedalam subgenus yang sama dengan *coronavirus* yang menjadi penyebab wabah SARS pada tahun 2002 hingga tahun 2004, yakni sarbecovirus. Atas dasar tersebut, *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) telah memberikan nama penyebab COVID-19 sebagai penyakit yang timbul dari virus SARS-CoV-2.¹²⁹

Manusia yang terjangkit COVID-19 mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan fungsi telinga, hidung, dan tenggorokan serta fungsi paru-paru. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa

¹²⁹ ICTV Executive Committee, *Taxonomic Proposals of the Coronavirus Study Group*, International Committee on Taxonomy of Viruses, London, 2020, hlm.7.

lelah, serta batuk kering.

Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilangnya indera penciuman dan pembauan, atau kulit menjadi ruam.¹³⁰

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) melalui Direktorat Jenderal World Health Organization (WHO) yakni Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menetapkan bahwa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan gejala yang sudah masuk ke tingkat pandemi global.¹³¹

Atas dasar tersebut, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, telah mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, yang telah ditularkan melalui kontak transmisi dari manusia ke manusia lainnya.

Kemudian, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020, yang menyatakan bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan secara legal formal dalam aspek positivistik sebagai bencana nasional.

¹³⁰ Wang Zhou, *Op.Cit*, hlm. 104-105.

¹³¹ Labour Inspection and Occupational Safety and Health Branch, *Dalam Menghadapai Pandemi : Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, International Labour Organization, Geneva, 2020, hlm. 7.

E. Kajian Umum Mengenai *Hoax* dan Disinformasi

1. Pengertian *Hoax*

Secara historis dalam segi etimologis, kata *hoax* berasal dari kalimat bahasa latin yakni *Hocus*. Istilah ini diperkirakan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1656, dimana istilah ini disematkan kepada para pesulap yang memiliki akal dan trik untuk mengelabui publik dengan trik yang sebenarnya merupakan intrik dari rangkaian suatu kebohongan, dengan matranya yang disebut oleh para pesulap yakni "*Hoc Est Corpus*". Menurut seorang filolog yakni Robert Nares, istilah *hoax* menjadi populer di Inggris pada abad ke-18 dan diperkenalkan sebagai diksi bahasa baku dan bahasa keseharian, dimulai dengan pencantuman diksi *hoax* dalam buku "*A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names and Allusions to Customs*".¹³²

Hoax dalam kata linguistik Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong ataupun berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita berita yang isinya tidak sinkron dengan kebenaran daripada yang sesungguhnya (*materiele waarheid*).¹³³

Hoax atau berita bohong dalam perspektif ilmu komunikasi dapat didefinisikan sebagai berita yang berusaha untuk menggantikan berita yang sebenarnya. Berita ini memiliki tujuan untuk memalsukan atau melakukan entri ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita

¹³² Kharisma Dhimas Syuhada, *Tinjauan Buku Etika Media di Era "Post Truth"*, Jurnal Komunikasi Indonesia Vol.V Nomor 1, Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 77-78.

¹³³ Ibnu Nadzir, *Hoax and Misinformation In Indonesia : Insights from a Nationwide Survey*, ISEAS Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, Singapura, 2019, hlm. 3.

bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan menambahkan suatu teori persekongkolan.¹³⁴

Emiry memberikan pendapat secara akademis bahwa *hoax* dapat didefinisikan sebagai rangkaian dari suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menipu ataupun untuk membohongi masyarakat. Berita bohong yang tersebar mempunyai faktor kesengajaan yang membuat berbeda dengan berita-berita yang lainnya. Umumnya berita bohong dapat ditemukan di dalam spam email, virus komputer, berita bohong medis, rumor, lelucon, ataupun cerita rakyat.¹³⁵

Secara doktrin hukum, Hoge Raad memberikan definisi terkait berita bohong dalam *arrest* yang terbit pada tanggal 12 Juni 1911, W. 9902: *Een logenachtig bericht is een logenachtig tijding dus niet slechts de tijding van feit, maar ook het vermelden van een verwachting*. Artinya suatu berita bohong adalah suatu berita yang tidak benar, sehingga berita semacam itu bukan hanya berisi berita mengenai kenyataan melainkan juga mengenai suatu pernyataan mengenai suatu pengharapan.¹³⁶

2. Pengertian Disinformasi

Berdasarkan *Cambridge Dictionary*, Disinformasi memiliki arti informasi yang memiliki kandungan yang salah atau informasi yang

¹³⁴ Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Penggunaan dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol.5, Nomor 1, JMDK, Malang, 2017, hlm.62.

¹³⁵ Henry B. Dunn & Charlotte A. Allen, *Rumors, Urban Legends And Internet Hoaxes*, Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators, Austin State University, Texas, 2005, hlm.88.

¹³⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 225.

beberapa kandungannya sudah dihilangkan (*dis*). Kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan disinformasi ialah penyampaian informasi yang salah untuk membingungkan pihak orang lain.¹³⁷

Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka definisi disinformasi yang komprehensif ialah informasi keliru yang disebarkan dengan tujuan membuat informasi yang asli tidak valid, berkurang kebenarannya, dan/atau tidak berguna.¹³⁸

Disinformasi dapat diartikan sebagai suatu produksi informasi yang salah, dan pembuat serta penyebarannya sejatinya sudah dapat mengetahui bahwa informasi itu salah. Produksi dan penyebaran informasi salah ini pada umumnya dilakukan sengaja untuk tujuan politik atau komersial.¹³⁹

Dalam perspektif ilmu komunikasi, disinformasi adalah suatu konten yang memuat kabar-kabar bohong yang sengaja dibuat atau difabrikasi oleh seorang pembuat konten dalam bentuk audio atau dalam bentuk visual, dengan cara diskualifikasi beberapa kandungan informasi yang perlu disingkirkan atau ada yang ditambah-tambahkan oleh pembuat konten. Disinformasi merupakan hasil polarisasi antara

¹³⁷ Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, *Tool Kit Penanganan Hoaks dan Disinformasi*, MAFINDO, Jakarta, 2018, hlm.7.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 8.

¹³⁹ Konteks Indonesia, *Jurnalisme, "Berita Palsu", & Disinformasi*, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm.12.

misinformasi dan malinformasi, yang memiliki esensi kecacatan informasi (*types of information disorder*).¹⁴⁰ Sehingga, konten yang memiliki esensi disinformasi merupakan kabar yang dapat tergolong kurang lengkap namun jika dibiarkan akan membahayakan orang-orang lain yang akan membaca konten disinformasi tersebut dan akan menimbulkan kondisi yang disebut sebagai “*a social harm*”.¹⁴¹

Adapun jenis-jenis kelompok yang termasuk konten yang memiliki kandungan disinformasi, yakni sebagai berikut:¹⁴²

- 1) *Fabricated Content*, adalah konten yang baru dibuat secara sengaja dan di rancang untuk menipu dan merugikan.
- 2) *Manipulated Content*, adalah sebuah konten informasi di manipulasi dengan maksud untuk merusak ataupun untuk menipu.
- 3) *Imposter Content*, adalah ketika sebuah sumber asli ditiru dan dilakukan *editing*.
- 4) *False content*, adalah ketika konten yang asli kemudian disatukan dengan konteks sebuah informasi yang invalid atau salah.
- 5) *Misleading Content*, adalah pemakaian suatu informasi yang sesat yang dimaksudkan untuk membingkai suatu isu atau privat

¹⁴⁰ James Fetzer, *Disinformation: The Use of False Information*, University of Minnesota Duluth, Duluth, AS, 2004, hlm. 11.

¹⁴¹ Digital, Culture, Media and Sport Committee of House Of Commons Of England, *Oral Evidence: Fake News – 8 February 2018*, HC 363, Questions 573.

¹⁴² Claire Wardle, *Understanding Information Disorder*, First Draft, Cambridge, 2019, hlm.10-11.

(individu).

- 6) *False Connection*, adalah ketika dalam suatu konten yang terdapat kandungan berupa judul, gambar, isi atau keterangan tidak mendukung konten.
- 7) *Satire or Parody*, adalah ketika konten dibuat dengan maksud tidak ada niat untuk merugikan tetapi konten tersebut memiliki potensi untuk mengelabui.

F. Aspek Hukum Penyebaran Konten

Di masa era globalisasi, kemajuan di segala bidang sangat pesat, salah satunya di bidang Teknologi dan Informasi. Terdapat fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertukar informasi yang luas serta banyak. Selain kemudahan tersebut, perkembangan Teknologi Informasi juga terdapat dampak negatif karena dapat memicu timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi sebagai *Modus Operandi* nya atau yang bisa disebut dengan istilah *Cyber Crime*.

Salah satu dampaknya adalah maraknya terjadi tindak pidana yang melanggar ketentuan konten atau informasi yang masuk sebagai berita. Peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana yang melanggar ketentuan konten yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara ontologis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah aturan hukum pidana formil yang berasal dari Belanda yang berlaku di Hindia Belanda dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht* atau disebut

juga dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. *Wetboek van Strafrecht (WvS)* sendiri berasal dari *Code Penal* Perancis, yang dibawa dan diberlakukan di saat Napoleon ketika ia merebut Belanda dan memasukkan teritorial Belanda ke dalam Imperium Perancis sejak tahun 1810.¹⁴³

Berdasarkan amanat perintah dari Raja Belanda (*Invoeringsverordening*) yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 1917 (Stb. 1917 nomor 497) aturan hukum pidana materil berupa *Wetboek van Strafrecht* dinyatakan resmi berlaku di seluruh wilayah nusantara per tanggal 1 Januari 1918 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* 1915.¹⁴⁴ Kemudian aturan ini diadopsi oleh Indonesia melalui peraturan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang kedepannya akan diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁴⁵

Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dimaksudkan agar tidak terjadi timbulnya suatu kegiatan demonstrasi atau hal-hal lain yang memiliki esensi keonaran, yang menyebabkan ketenangan atau ketertiban Negara Indonesia saat itu yang baru saja merdeka dapat terganggu.¹⁴⁶

Ketentuan perihal konten atau informasi yang memuat suatu kabar

¹⁴³ Eddy O.S. Hiarej, *Op.Cit.*, hlm. 12 .

¹⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 5-7.

¹⁴⁵ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 72 .

¹⁴⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit.*, hlm. 73-77.

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 14 dan Pasal 15, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.¹⁴⁷

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.¹⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah mengatur mengenai kabar berita atau dapat juga disebut sebagai konten dengan basis ukuran kerugian bagi pihak konsumen yang mengandung kebohongan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 390 KUHP yakni sebagai berikut:

Pasal 390

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

¹⁴⁷ Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No.1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁴⁸ *Ibid*, Pasal 15.

Adapun penjelasan dari pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 14

Ialah sama dengan "*Verordening No. 18 van het Militair Gezag*".

Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.

Menyiarkan artinya sama dengan "*verspreiden*" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁴⁹

Penjelasan Pasal 15

Disusun tidak begitu luas sebagai "*verordening No. 19 van het Militair Gezag*".

Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 14.¹⁵⁰

Keberlakuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 1946 ini masih berada di ruang lingkup teritorial Pulau Jawa dan Madura, karena Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 (*Tomi Shudan*) untuk wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi sudah diserahkan dan jatuh kepada kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, wilayah hukum Indonesia bertambah sehingga meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura.

Atas konsekuensi hukum Pulau Sumatera telah masuk ke dalam

¹⁴⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 14.

¹⁵⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 15.

wilayah hukum Indonesia dan menjadi satu kesatuan dengan Negara Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk dan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1946. Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatera.

Pasal 1

Oleh karena berhubung dengan sukarnya perhubungan antara pulau Jawa dan daerah Negara Indonesia yang lain, sekarang belum dapat ditetapkan bilamana Undang-undang ini akan berlaku buat daerah di luar pulau Jawa dan Madura, maka sebaiknya diserahkan kepada Presiden untuk menentukan saat itu.¹⁵¹

Setelah penerbitan aturan tersebut, Indonesia mengalami proses panjang dalam usahanya untuk menyatukan dan merebut semua wilayahnya yang dimaksudkan untuk kelengkapan teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan Mochammad Hatta.

Pada akhirnya, usaha Presiden Soekarno dan Mochammad Hatta untuk menyatukan kembali teritori kepulauan Indonesia dibawah naungan Republik Indonesia Serikat (RIS) terwujud dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, dimana Indonesia diwakili oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mochammad Hatta.¹⁵²

Namun, untuk Provinsi Irian Jaya atau Papua belum diserahkan kepada

¹⁵¹ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 8 Tahun 1946, Tentnag Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatera.

¹⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*, Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.5

Indonesia oleh Belanda, disebabkan persesuaian antara pendirian masing-masing pihak dalam Konferensi tentang Irian belum mencapai kesepakatan.¹⁵³

Kemudian, hasil Konferensi Meja Bundar diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk diratifikasi agar keberlakuannya menjadi sah secara hukum. KNIP yang bersidang pada 6 Desember 1949, menerima hasil KMB itu dengan total suara 226 mendukung, 62 suara menentang, serta 31 pihak anggota KNIP yang meninggalkan sidang.¹⁵⁴

Pada tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah menetapkan Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 telah diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵⁵

Peralihan Indonesia dari Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan menyebabkan hukum positif Indonesia khususnya hukum pidana membutuhkan status kejelasan. Maka dari itu, Pemerintah Soekarno dan Hatta dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm.12-13

¹⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 56-57.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1

Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁵⁶

Pasal 2

Pasal 16 Undang-undang No. I tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dicabut.¹⁵⁷

Hukum memiliki sifat dinamis, artinya bahwa hukum dan produk hukum sendiri harus mengikuti perkembangan zaman dan waktu, dengan maksud hakikat agar hukum sendiri tidak mengalami ketertinggalan eksistensi hukum dan adagium hukum itu sendiri khususnya yakni *Ubi Societas Ibi Ius*. Oleh karena itu, dengan keadaan masyarakat yang dinamis dan berkembang secara pesat, maka hukum harus mengikuti keadaan masyarakat yang dinamis pula.¹⁵⁸

Perkembangan dinamika masyarakat yang dinamis diterima sebagai konsekuensi atas globalisme dunia, terutama dalam aspek teknologi dan informasi. Globalisme mengendaki adanya interdependensi struktural sebagai bagian dari perubahan sistem ekonomi dan teknologi.¹⁵⁹

Adapun lembaga dalam tataran globalisme yang menanggapi perkembangan teknologi dan informasi yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu subjek hukum dari Hukum Internasional. Menurut

¹⁵⁶ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No.73 Tahun 1958, Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵⁷ *Ibid*, Pasal 2 .

¹⁵⁸ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 201.

¹⁵⁹ Nuraeny & Deasy Silva, *Regionalisme dalam Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, penyelenggaraan kegiatan teknologi informatika harus diwadahi dengan aturan-aturan yang pasti, demi stabilisasi masyarakat beserta negara dan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan siber lainnya. Hal ini tertuang di dalam *Intenational Review of Criminal Policy-United Nations Manual on The Prevention and Control of Computer-Related Crime*, yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994 yakni sebagai berikut:

The committe recommended six basic principles that should be taken into account by member States when enacting legislation in the field of computer-related criem privacy:

a) The protection of privacy against offences caused by modern computer technology is of great importance. However, this protection should be based primarily on administrative and civil law regulations. Recourse to criminal law should be made only as a last. This means that criminal sanctions should be used only in cases of severe offences in which adequate regulation cannot be achieved by administrative or civil law measures (ultima ratio principle);

b) The respective criminal provisions must describe the forbidden acts precisely and should avoid vague general clauses. A precise description of illegal acts, without however resorting to a casuistic legislation technique, can easily be achieved, for example, for specific sensitive data;

c) The criminalized acts should be describe as clearly as possible by the respective penal law provisions;

d) Different computer-related infringements of privacy should not be criminaized im one global provision. The principle of culpability requires a differentiation according to the interests affected, the acts committed and the status of the perpetrator, as well as of his intended aims and other mental elements;

e) In principle, computer-related infringements of privacy should only be punishable if the perpetrator acts with intent;

f) Minor computer-related offences against privacy should be punished only in accordance with Council of Europe Recommendation No.(87)18 on the simplification of criminal justice, on complaint of the victim or of the Privacy Protection Commissioner or of the Privacy Protection Authority.¹⁶⁰

¹⁶⁰ International Review of Criminal Policy No. 43 and 44: United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime of United Nations.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 prinsip dasar yang dapat digunakan dalam mekanisme perancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur perihal kejahatan siber yakni sebagai berikut:

- a) Agar dalam upaya melindungi suatu kepentingan yuridis yang berkaitan dengan teknologi informasi, hukum pidana ditempatkan untuk sarana terakhir (*ultimum remidium*), karena penerapan hukum administrasi dan hukum perdata lebih penting di kedepankan;
- b) Ketentuan dalam hukum pidana harus menguraikan perbuatan yang dilarang secara tepat, spesifik dan harus menghindari suatu perumusan yang multitafsir. Ketentuan tersebut perlu dilakukan untuk menyelaraskan antara perbuatan individu dengan kemerdekaan seseorang dengan kebebasan individu untuk memperoleh suatu informasi;
- c) Di dalam upaya kriminalisasi pelaku, perlu diuraikan secara rigid dalam ketentuan aturan yang berorientasikan pada hukum pidana di masing-masing negara. Oleh karena itu, pengadaan perluasan untuk ketentuan yang akan digunakan sebagai acuan yang belum jelas dan sulit dipahami harus di hindari. Jika acuan eksplisit ataupun implisit digunakan untuk menerapkan peraturan yang berorientasikan hukum pidana, maka ketentuan tersebut harus jelas

pula;

- d) Prinsip kesalahan yang terdapat pada si pembuat (asas culpabilitas) dan tujuan dari suatu tindak kejahatan selalu menjadi bagian unsur pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan siber;
- e) Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dapat dikenakan karena seseorang telah lalai melakukan suatu (delik omisionis), sehingga perlu didasari pada pertimbangan-pertimbangan secara mendalam;
- f) Pelanggaran terhadap kebebasan privat termasuk ke dalam delik aduan.

Sifat dinamis pada masyarakat menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat membuat pengaturan mengenai kabar informasi yang memuat berita dalam suatu konten pun diperluas. Kemudian faktor interdependensi structural membuat Indonesia harus mengikuti perkembangan arus globalisasi dan ketentuan-ketentuan yuridis yang telah lahir, salah satunya yakni *Intenational Review of Criminal Policy-United Nations Manual on The Prevention and Control of Computer-Related Crime*, sehingga perlu diakan suatu aturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini, penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan hukum untuk masyarakat dan negara.¹⁶¹

Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di inisiasi oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi sejak bulan Maret tahun 2003. Rancangan Undang-Undang ini merupakan sublimasi dari peraturan yang telah dibuat oleh dua kementerian yaitu dari Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang telah bekerja sama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta dari Tim Asistensi Institut Teknologi Bandung.¹⁶²

Rancangan Undang-Undang ini kemudian disampaikan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2005, sebagai konsekuensi yuridis atas terbitnya Surat Presiden Republik Indonesia No.R/70/Pres/9/2005. Kemudian, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).¹⁶³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur berbagai aspek dalam ruang digitalisasi informasi dan transaksi elektronik, termasuk salah satunya

¹⁶¹ Didik Endro P, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm.46.

¹⁶² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 135.

¹⁶³ *Ibid*, hlm.136.

yang berkenaan dengan suatu konten berita yang memuat suatu informasi beserta sanksi pidananya jika terdapat unsur bahwa konten berita tersebut adalah berita bohong yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik , yaitu:

Pasal 28 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45 Ayat (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi tujuh pokok poin penting yang merevisi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, terutama melalui Undang-Undang yang baru ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses internet terhadap informasi elektronik yang telah bermuatan melanggar hukum. Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan Internet.¹⁶⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat berbagai revisi atau perubahan ketentuan redaksi pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya yakni perubahan sanksi pidana atas tindak pidana berita bohong yang dapat merugikan konsumen secara ekonomis dalam transaksi elektronik yang telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 45A Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

E. Tinjauan Hukum Tentang Penyebaran Konten

Dalam konteks hukum mengenai penyebaran konten yang memiliki esensi sebuah informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

¹⁶⁴ Achmadudin Rajab, *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 04 - Desember 2017, hlm. 469-470.

Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berlaku sebagai regulasi dalam hal penyebaran konten yang berisi informasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana khususnya dalam pasal 14 dan Pasal 15 telah memberikan ketentuan hukum dan saksi pidananya, yakni berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memuat ketentuan bahwa individu yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 14 ayat (2) memuat ketentuan pidana bahwa terhadap seseorang atau individu yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat

menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Unsur menyiarkan kabar dalam pasal 14 dan pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki arti bahwa tindakan menyebarluaskan sesuatu hal di dalam konteks untuk menyebarkan secara universal umum. Unsur menyiarkan juga memiliki arti gramatikal secara konstruksi hukum, yakni memiliki makna meratakan ke mana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), mengumumkan (berita dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), serta memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya).¹⁶⁵

Konteks diksi "menerbitkan" memiliki arti bahwa terdapat sesuatu yang menimbulkan (perselisihan dan sebagainya), membangkitkan (amarah dan sebagainya), mendatangkan (kebakaran, kerugian, bahaya, dan sebagainya), mengeluarkan (majalah, buku, dan sebagainya).¹⁶⁶

Arti dari kata “dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat“, memiliki arti secara penafsiran gramatikal, yakni :¹⁶⁷

a) Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan

131.

¹⁶⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, hlm.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 131.

sebagainya).

- b) Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya).

Keonaran yakni hasil kata kerja dari kalimat baku Bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kata onar. Onar dari arti linguistik adalah keributan, dalam konteks hukum, onar itu artinya tidak harus terjadi keributan fisik efek kausalitasnya, tetapi di dalam pengertian onar membuat orang menjadi bertanya-tanya, membuat orang gaduh, serta membuat orang heran itu juga onar menurut pengertian ini, bahwa sebuah konten berita yang pro dan kontra dari segi bahasa dapat termasuk esensi onar.¹⁶⁸

Untuk dapatnya diterapkan keonaran menurut pasal ini, cukup apabila dari benih-benih kekacauan itu telah tampak dan muncul kepermukaan, dan kegaduhan telah terjadi dalam masyarakat.¹⁶⁹

Tindak pidana atau delik yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) mengandung makna bahwa maksud menyiarkan atau memberitahukan berita kebohongan yang sengaja menimbulkan keonaran pada masyarakat, sehingga dalam konteks jika individu berbohong yang menimbulkan keonaran atau individu berita atau kabar bohong mengakibatkan terjadinya keonaran atau ketidaktenangan suatu situasi maka dapat dipidana maka dalam hal ini masuk kedalam delik materiil jika ada akibatnya maka itu

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 144.

bisa dijatuhi pidana.

Dalam konteks ini, keonaran yang tercantum di dalam pasal 14 ayat (1) adalah keonaran yang timbulnya suatu kerusuhan atau keadaan yang suatu kondisi disuatu tempat atau di masyarakat sehingga orang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan tenang hal ini kerusuhan atau hal yang bertentangan ini timbul karena pro dan kontra ada orang yang menyayangkan sesuatu orang yang sepakat atau tidak sepakat mengenai sesuatu atau terdapat pertentangan antara dua kelompok atau golongan yang mereka menemukan titik temu atau pihak-pihak yang tidak puas akhirnya terjadi esensi pro dan kontra tersebut yang menjalar dan menyebabkan suatu tidak tenang tidak kondusif.

Penafsiran sistematis (dogmatis) dapat dimaknai sebagai penafsiran yang menelaah terhadap susunan yang memiliki hubungan dengan narasi dalam pasal-pasal lainnya baik di dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.¹⁷⁰ Secara paradigma dalam penafsiran sistematis, terdapat perbedaan antara Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di dalam diksi yang termaktub dalam pasal tersebut dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukanlah kabar “bohong”, melainkan:

¹⁷⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 67 .

- 1) kabar yang tidak pasti;
- 2) kabar yang berlebihan;
- 3) kabar yang tidak lengkap.

Dalam konteks pasal ini, terkandung makna bahwa kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong.

Dalam bagian penjelasan umum pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini, disebutkan bahwa kabar yang tidak pasti disebut juga dengan kabar angin, yakni kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.

Unsur yang terakhir dari Pasal 15, yaitu unsur “ia mengerti setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.¹⁷¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan batasan dalam hal penyebaran konten yang dikhususkan pada esensial berita. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁷¹ Eldmer C.G.Lewan, *Ibid*, hlm. 102.

Elektronik menyebutkan bahwa:

Pasal 28 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dalam hal sanksi pidana atas terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana materil yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan ketentuan sanksi pidana tersebut, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 45A ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, yang dimaksud dengan transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal 28 ayat (1) , sebagai pasal yang dapat menjerat tindak pidana penyebaran berita

bohong, tetapi esensi Pasal 28 ayat (1) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada konsumen, sedangkan Pasal 28 ayat (2) bentuk kejahatannya adalah dengan menyebarkan informasi (ujaran) yang menimbulkan anasir kebencian yang memiliki esensi ujaran kebencian atau disebut dengan *hate speech*.

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Dalam teori jual dan beli yang terdapat dalam Ilmu Ekonomi, konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni konsumen personal dan konsumen organisasional.¹⁷²

Konsumen personal yakni individu (*person*) yang membeli suatu barang dan jasa untuk digunakan oleh sendirinya yang dimaksudkan untuk penggunaan internal privat, seperti diri sendiri, rumah tangga, atau untuk kalangan keluarganya.¹⁷³

Sedangkan untuk konsumen organisasional dapat diartikan sebagai sebuah badan hukum, agen dari pihak pemerintah, atau institusi profit ataupun non-profit yang membeli suatu barang dan jasa, ataupun peralatan lain yang diperuntukkan untuk digunakan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan prima dan baik.¹⁷⁴

Dalam perspektif Ilmu Ekonomi, pihak konsumen dapat dirugikan

¹⁷² Dewi Fadila & Ridho, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013, hlm.1.

¹⁷³ Vijay Victor, Jose Joy Thoppan, Robert Jeyakumar Nathan, Fekete Farkas Maria, *Factors Influencing Consumer Behavior and Prospective Purchase Decisions in a Dynamic Pricing Environment—An Exploratory Factor Analysis Approach*, *Social Science Vol. 7 No. 153*, School of Management and Business Administration, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, 2018, hlm. 2.

¹⁷⁴ Dimple Turka, Sujata Sasan, *Organisational Buying Behaviour*, International Journal of Applied Research Vol.1 No.11, Govt College for Women, Ambala City, 2015, hlm. 391.

dari pihak produsen, yakni pihak yang memproduksi dan/atau memiliki produk atau jasa yang telah dikuasai oleh konsumen. Kerugian konsumen memiliki arti sebagai peristiwa yang dialami oleh pihak konsumen, dimana pihak konsumen tidak mendapatkan kepuasan yang dapat diartikan sebagai harapan dari pihak pembeli seorang konsumen tidak dipenuhi atau tidak dapat dilebihi oleh sebuah produk.